

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD) BERBASIS KINERJA**

**Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat**

**Tahun 2004**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**Sri Media Insani  
012114238**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2005**

Skripsi

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH (APBD) BERBASIS KINERJA**

**Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat  
Tahun 2004**

Oleh:

Sri Media Insani  
012114238

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. G. Anto Listianto. MSA., Akt.

tanggal 16 September 2005

Pembimbing II



Firma Sulistiyowati. SE., MSi.

tanggal 17 Oktober 2005

**SKRIPSI**

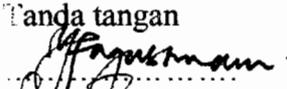
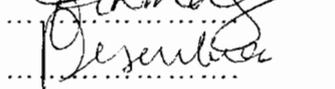
**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
BERBASIS KINERJA  
Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Sumatera Barat Tahun  
2004**

Dipersiapkan dan ditulis oleh

Sri Media Insani  
012114238

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 30 November 2005  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Panitia Penguji**

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	Dra. YF. Gien., M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Drs. Gabriel Anto Listianto Akt., MSA.	
Anggota	Firna Suiistiyowati S.E., M.Si.	
Anggota	Dionysius Desembriarto S.E., M.Si.	

Yogyakarta, 20 Desember 2005  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan,

  
Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.  
NIP. 131 282 330

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu  
semua orang tertawa bahagia,  
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis;  
dan pada kematianmu semua orang menangis sedih,  
tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.

*Mahatma Gandhi*

Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya  
lebih berharga namun juga lebih berguna  
dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun.

*George Bernard Shaw*

Jika tidak bisa menjadi orang pandai,  
jadilah orang yang baik.

*Renungan Penulis*

Karya ini ku persembahkan kepada:

- *Allah S.W.T*
- *Papa dan Mama Tercinta*
- *Kakak-kakakku: Welly, Jemi dan Yozi*
- *Ponakanku: Faruq, Fattah dan Fattih*
- *Belahan Hatiku*
- *Almamaterku*

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, November 2005

Penulis

Sri Media Insani

**ABSTRAK**  
**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(APBD) BERBASIS KINERJA**  
**(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat**  
**Tahun 2004)**

**SRI MEDIA INSANI**  
**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**  
**YOGYAKARTA**  
**2005**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui hasil penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja. (2) Mengetahui tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah tahun anggaran 2004.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Sumatera Barat tahun 2004. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan teknik observasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis varians dan teknik analisis efisiensi. Analisis varians digunakan untuk membandingkan selisih/ perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan dalam laporan keuangan. Sedangkan analisis efisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/ proyek.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Rencana anggaran pendapatan lebih kecil daripada realisasinya dengan varians sebesar Rp 9.653.153.842,38 atau 3,57%. Pada pos belanja, jumlah anggaran belanja lebih kecil daripada realisasinya dengan varians sebesar Rp 33.265.058.921,62 atau 12,08%. (2) Tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah Kabupaten Agam menurut Pemerintah Daerah di mana selama periode penelitian Tahun Anggaran 2004 dengan tingkat efisiensi sebesar 86,39% artinya cukup efisien. Tetapi tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah sesuai Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004 adalah 97,86% yang berarti kurang efisien sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 2004.

**ABSTRACT**  
**REGIONAL BUDGET ANALYSIS BASED ON PERFORMANCE**  
**( Case Study at Agam Regency Government of West Sumatera in the**  
**Year 2004)**

**SRI MEDIA INSANI**  
**SANATA DHARMA UNIVERSITY**  
**YOGYAKARTA**  
**2005**

This research aimed at: (1) knowing the result of Regional Budget (APBD) Application Based on Performance. (2) knowing the efficiency level of routine expenditure in the fiscal year of 2004.

The research type was case study at Local Government of Agam Regency of West Sumatra in the year of 2004. The techniques of data collecting used were interview, documentation and observation techniques.

The techniques of data analysis used were analysis of variance and efficiency analysis. Analysis of variance was used to compare the difference between the actual performance with the estimated one in financial statement. Whereas the efficiency analysis was used to know how much was the efficiency of an activity (project) implementation.

Based on data analysis, it was obtained the conclusion as follows: (1) the estimated income was smaller than its realization with variance equal to Rp 9.653.153.842,38 or 3,57%. At expenditure post, the estimated expenditure was smaller than its realization with variance equal to Rp 33.265.058.921,62 or 12,08%. (2) the routine expenditures efficiency level of Agam Regency according to Local Government during the period of research in the year of 2004 equal to 86,39%, meaning it was efficient enough. But the routine expenditures efficiency level according to 2004 Autonomy Law was 97,86%, meaning it was less efficient as stated in the Domestic Minister of Internal Affair Decree number 690.900.327, 2004.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja”. Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2004.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, MSA., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Drs. G. Anto Listianto. MSA., Akt., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Firma Sulistiyowati. SE., MSi., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen-dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

6. Bapak Drs. H. Aristo Munandar, sebagai Bupati Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
7. Bapak Drs. Suardi Yunus, sebagai kepala BAPPEDA Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
8. Papa dan Mama tercinta, atas kasih sayang, doa, bantuan, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama kuliah di Jogja.
9. Kakak-kakakku tersayang: Welly “celok”, Da Well, Bang Jem dan Yozi serta ponakanku tercinta Faruq Qadli, sikembar Fatah Miqshad dan Fatih Miqshad atas doa, bantuan dan dukungannya selama ini.
10. Pak Etek Hasan dan Tante Nang, serta sepupu-sepupuku Ane, Oki, Idon dan Ilham atas doa, dukungan dan bantuannya selama penulis di Jogja.
11. Belahan hatiku: Adel, buat cinta dan dukungannya selama ini.
12. Teman-teman kontrakanku: Ririn, Lia, Kiki dan printernya, Dewi dan Miko (cowok sendiri lho), friend forever ya. Semangat!!!
13. Teman-teman pandaku Ruri, Eno, dan Sony atas semangat dan dukungannya. Thank’s ya udah mau jadi temanku.
14. Teman-teman terbaikku: M’yan, Afi, Mila, Ica, Ike, Andika, Jojon, Dedy, Yani, Anton, Nanang, Rika, Dony, dan Wanda .
15. Teman-teman KKP: Afi, Cici Ervi, Sisil, Mas Debyo, dan Mas Ratno. Miss you all friend.
16. Teman-temanku di Bella/Gemini Net: Pipiet, Mas Fajar, Mas Fahri, dll.
17. Semua teman-teman akuntansi USD angkatan 2001, kelas A, B, C dan khususnya kelas D yang udah mau menjadi temanku.

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Yogyakarta, 12 November 2005

Penulis

Sri Media Insani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRAC .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian .....	3
F. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Good Governance</i> .....	6
A. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	6
B. Karakteristik <i>Good Governance</i> Menurut UNDP ...	7
C. Reformasi Manajemen Keuangan Daerah .....	8

B. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	
A. Anggaran .....	8
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)....	10
C. Karakteristik APBD .....	12
D. Fungsi APBD .....	14
C. Kinerja	
A. Pengertian Kinerja .....	15
B. Pengertian Anggaran Kinerja .....	16
C. Anggaran Berbasis Kinerja Berorientasi Kepada Publik .....	18
D. Persyaratan Penerapan Anggaran Kinerja .....	19
E. Proses Penyusunan Anggaran Kinerja .....	21
F. Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah .....	24
G. Analisis APBD Berbasis Kinerja.....	26
H. Laporan Kinerja Keuangan (Surplus-Defisit) .....	27
D. Efisiensi	
1. Efisiensi APBD .....	28
2. Analisis Efisiensi .....	28
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	30

C. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
E. Teknik Analisa Data	
1. Analisis Varians .....	31
2. Analisis Efisiensi .....	33
<b>BAB IV</b> <b>GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Kabupaten Agam .....	35
B. Keadaan Geografis .....	36
C. Keadaan Penduduk .....	37
D. Pemerintahan .....	38
E. Sosial	
1. Pendidikan .....	39
2. Kesehatan .....	40
F. Keuangan .....	41
<b>BAB V</b> <b>ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Data .....	45
B. Penjelasan Pos Neraca Per 31 Desember 2004 .....	47
C. Analisis Data	
1. Analisis Varians .....	57
2. Analisis Efisiensi .....	60
D. Pembahasan .....	62

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....	66
B. Keterbatasan Penelitian .....	67
C. Saran .....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Kriteria Kinerja Keuangan .....	29
Tabel 3.1 Analisis Varians.....	32
Tabel 3.2 Kriteria Kinerja Keuangan .....	34
Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemda Tingkat II Agam Menurut Golongan .....	38
Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemda Tingkat II Agam Menurut Pendidikan .....	39
Tabel 5.1. Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Agam .....	46
Tabel 5.2. Laporan Aliran Kas Pemerintah Kabupaten Agam .....	53
Tabel 5.3. Ringkasan Perhitungan APBD .....	55
Tabel 5.4. Laporan Surplus Defisit.....	56
Tabel 5.5 Ringkasan Perhitungan APBD .....	58
Tabel 5.6 Analisis Varians.....	59
Tabel 5.7 Kesimpulan Analisis Varians.....	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi yang merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas (Mardiasmo, 2002:25).

Pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai. Menyadari pentingnya pelaksanaan otonomi daerah tersebut maka pemerintahan telah mengeluarkan perangkat perundang-undangan untuk mendukung kesuksesan otonomi daerah yaitu dengan mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selain reformasi manajemen sektor publik, untuk terciptanya *good governance* maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Reformasi keuangan daerah secara langsung juga akan berdampak pada perlunya dilakukan reformasi anggaran daerah (APBD).

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Disamping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisien, dan efektifitas (Mardiasmo, 2002:117).

Agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif, maka perencanaan anggaran daerah harus disusun berbasiskan kinerja. Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja ini maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini:

1. Ruang lingkup penelitian mencakup mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2004.
2. Teknik analisa yang digunakan untuk mengukur kinerja hanya teknik analisa varians dan teknik analisa efisiensi.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, salah satunya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada pasal 8 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berbasis kinerja.

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Hasil Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja di Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah tahun anggaran 2004 di Kabupaten Agam?

### **D. Tujuan Penelitian:**

1. Mengetahui hasil penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja di Kabupaten Agam.
2. Mengetahui tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah tahun anggaran 2004 di Kabupaten Agam.

### **E. Manfaat Penelitian:**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Agam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan informasi dalam penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Agam untuk masa yang akan datang.

2. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang kebijakan administrasi publik serta memperoleh pengetahuan tentang teknis penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja didalam keseluruhan perencanaan program dan anggaran daerah.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi universitas sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

**F. Sistematika Penulisan:**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian dari teoritis studi pustaka. Uraian ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai landasan berfikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh, dan menganalisa permasalahan untuk mendapatkan pemecahan atas permasalahan yang diajukan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM KABUPATEN AGAM**

Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah Kabupaten Agam, keadaan geografis, penduduk, pemerintahan, sosial pendidikan dan kesehatan, serta keuangan Pemerintahan Kabupaten Agam secara umum berdasarkan data-data yang diperoleh.

**BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Agam dengan menggunakan metode dan teknik yang diuraikan dalam metode penelitian serta pembahasan.

**BAB VI : PENUTUP**

Dengan melihat hasil penelitian, pada bab ini diuraikan kesimpulan yang dapat diambil dan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada yang diharapkan dapat berguna bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### **A. Good Governance**

*Good governance* merupakan paradigma yang dikembangkan oleh *World Bank*, *United Nation Development Programme* (UNDP) dan *Asia Development Bank* (ADB) yang menegaskan pentingnya kesejajaran dan keharmonisan hubungan antara tiga elemen kunci negara: pemerintah (*government*), pasar (*business*), dan masyarakat (*civil society*). (Mardiasmo, 2002:23).

#### **1. Pengertian Good Governance**

Menurut Mardiasmo pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik (Mardiasmo, 2003:23). Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002:24).

## 2. Karakteristik *Good Governance* Menurut UNDP

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi:

- a) *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c) *Transparence*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.
- d) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap melayani stakeholder.
- e) *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g) *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h) *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

- i) *Strategic vision*. Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

### **3. Reformasi Manajemen Keuangan Daerah**

Penerapan prinsip *good governance* menuntut adanya reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu manajemen keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum di bidang keuangan negara dan meningkatkan kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2002:96).

Reformasi manajemen keuangan perlu dilakukan secara menyeluruh sejak dari proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, sistem informasi dan audit. Hal ini sangat penting untuk dipahami bersama karena reformasi yang terpenggal-penggal hanya akan menghasilkan output yang tidak optimal (Salomo, 2003:36).

### **B. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

#### **1. Anggaran**

Beberapa pengertian anggaran yang bisa ditunjukkan adalah sebagai berikut:

- a) Anggaran adalah suatu rencana finansial yang biasanya mencakup jangka waktu satu tahun dan merupakan alat perencanaan jangka pendek dan pengendalian organisasi (Anthony & Govindarajan, 1998).
- b) Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun (Mulyadi, 1993).

- c) Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber dari suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Suriyono, 2000).
- d) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2001).

Dari beberapa pengertian anggaran sebagaimana diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut (Indra Bastian, 2000:81):

- a) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- b) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
- c) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggungjawab guna mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.
- d) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- e) Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu.

- f) Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

## **2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Nadeak, 2003:11) merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut, Pemerintah Daerah harus melaksanakan fungsi pertama, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, dan kedua, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsif, efisien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan (pendapatan) dari APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja).

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam anggaran. Anggaran yang dibuat akan mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat (Mardiasmo, 2003):

- a) Adanya pertanggungjawaban pemungutan pajak dan pungutan lain-lain oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar ekonomi.
- b) Adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya.

- c) Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat distribusi penghasilan dalam ekonomi.

Pengertian APBD menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Mamesah (1995:20) pada orde baru adalah:

“Rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

Definisi menurut Mamesah (1995:20-21) mengandung unsur:

- a) Rencana operasional daerah, yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
- b) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c) Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan, dan jenis proyek.

- d) Untuk keperluan satu tahun anggaran yaitu April sampai dengan Maret dan Januari sampai dengan Desember.

Menurut Wajong (1962:81) pengertian APBD adalah:

“Rencana keuangan yang dibuat jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberi kredit kepada badan eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi”.

### 3. Karakteristik APBD

Karakteristik APBD menurut Abdul Halim (2002:17):

- a) APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah.
- b) Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan tradisional (*line item*) yaitu anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.
- c) Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan, dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintahan Daerah Tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.

- d) Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- e) Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- f) Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan tata buku anggaran yaitu anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD yang baru didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah terutama UU No. 32/2004, UU No. 33/2004, dan PP No. 105/2000.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD diperkirakan tidak akan terdiri dari dua sisi dan akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak Pemerintah Daerah, sedangkan pinjaman belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah. Pos

pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutup defisit anggaran. (Marwis, 2003:53).

Dalam bentuk APBD yang baru itu pula, penerimaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Selanjutnya pengeluaran diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu Belanja Administrasi Umum (BAU), Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga.

#### **4. Fungsi APBD**

Fungsi APBD menurut Mamesah (1995:18) adalah:

- a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
- c) Memberi isi dan arti kepada tanggungjawab Pemerintah Daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah Daerah.
- d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah didalam batas-batas tertentu.

## C. Kinerja

### 1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategik suatu organisasi. (IAI-Kompartemen Akuntan Sektor Publik-bidang Akuntabilitas Sektor Publik, 2002:4).

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi dan misi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Kinerja menunjukkan tingkat efisiensi dan efektifitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada di dalam organisasi. (IAI-Kompartemen Akuntan Sektor Publik-bidang Akuntabilitas Sektor Publik, 2002:9).

Kinerja biasa juga disebut *performance* (prestasi kerja). Kinerja menurut Suyadi (1992:2) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Indra Bastian (2001:329) pengertian kinerja adalah:

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi”.

## **2. Pengertian Anggaran Kinerja**

Salah satu prinsip umum anggaran adalah efisiensi dan efektifitas anggaran, namun sampai saat ini hasilnya masih sangat jauh dari sempurna. Dalam era penerapan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), isu efisiensi dan efektifitas kembali marak, bahkan ditambah pula dengan perlu diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran, sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Struktur APBD berbasis kinerja terdiri dari: (a) Pendapatan Daerah; (b) Belanja Daerah; (c) Pembiayaan. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi kepada kepentingan publik. (Mardiasmo, 2002:105).

APBD yang disusun berbasis kinerja harus memuat beberapa hal sebagai berikut (Mardiasmo, 2002:187):

- a) Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
- b) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
- c) Persentase dari jumlah pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

Proses perencanaan anggaran daerah yang berbasis pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi.

Ketiga elemen tersebut adalah (Mardiasmo, 2002:126):

- a) Masyarakat
- b) DPRD
- c) Pemerintah Daerah

Dalam struktur APBD yang baru, Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dan Pinjaman (Utang) tidak lagi dimasukkan sebagai penerimaan daerah. Dengan struktur baru tersebut akan lebih mudah mengetahui surplus atau defisit, sehingga meningkatkan transparansi informasi anggaran kepada masyarakat (publik).

Manfaat penerapan anggaran berbasis kinerja (PAU SE-KP, 2003):

- a) Penghematan anggaran
- b) Anggaran kinerja mencegah anggaran fiktif
- c) Kinerja masing-masing dinas/ instansi dapat diukur

- d) Mudah mengetahui dinas/ instansi yang mempunyai beban kerja rendah, sehingga memudahkan untuk penataan kelembagaan, apakah perlu dikembangkan atau digabung.
- e) Masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan harapan, mengusulkan, dan mengontrol rancangan APBD.

### **3. Anggaran Berbasis Kinerja Berorientasi Kepada Publik**

Anggaran berbasis kinerja dirancang sebagai jawaban permasalahan berbagai kelemahan anggaran tradisional yang selama ini digunakan dalam APBD. Anggaran berbasis kinerja yang bertumpu pada kemampuan sumber daya daerah dan upaya pemenuhan tuntutan masyarakat. Konsep penganggaran bersifat integratif dan komprehensif dengan memberikan desentralisasi pengelolaan keuangan kepada unit kerja secara transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Konsep anggaran berbasis kinerja juga memberikan angin segar terhadap kemandegan sistem perencanaan anggaran daerah yang selama ini diterapkan. Konsep ini memberikan kesadaran baru tentang pentingnya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tanpa perencanaan yang matang, sistematis dan rasional dalam proses penganggaran, mustahil akan diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Dengan anggaran berbasis kinerja, seluruh alokasi dana sekecil apapun, harus mempunyai tujuan, sasaran dan target kerjanya. Sehingga tidak akan ada lagi alokasi dana yang tidak jelas peruntukannya. Dengan demikian alokasi dana APBD tidak lagi sekedar deretan angka-angka yang hanya dapat dimengerti oleh

badan pemeriksa keuangan, tapi lebih dari itu didalamnya juga tercantum ukuran manfaat yang dapat dirasakan baik langsung atau tidak langsung oleh masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan akan lebih berorientasi pada kepentingan publik.

#### **4. Persyaratan Penerapan Anggaran Kinerja**

Untuk dapat melaksanakan anggaran kinerja dengan baik diperlukan syarat utama, yaitu (PAU SE, 2000): (1) Keterlibatan DPRD dalam perencanaan anggaran, (2) Adanya desentralisasi wewenang hingga ke level Unit Kerja sebagai pusat pertanggungjawaban (*responsibility center*).

##### **1). Keterlibatan DPRD Dalam Perencanaan Anggaran**

Pelaksanaan anggaran kinerja terdiri atas: (1) Perencanaan anggaran, (2) SAB Makro, (3) SAB Mikro, dan (4) Pengendalian. Dari keempat hal tersebut perencanaan anggaran mempunyai porsi terbesar dalam menentukan keberhasilan anggaran kinerja dalam mencapai hasil yang diharapkan. Sebaik apapun anggaran yang disusun jika perencanaannya salah, maka akan memberikan hasil yang menyimpang. Oleh karena perencanaan anggaran merupakan bagian yang paling vital, maka pengawasan hendaknya sudah dilaksanakan sejak perencanaan anggaran.

DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam ikut menyusun perencanaan anggaran. Oleh karena itu, DPRD harus sudah dilibatkan dalam perencanaan anggaran (pembuatan anggaran *policy*). Keterlibatan DPRD dalam perencanaan anggaran kinerja

menimbulkan konsekuensi DPRD harus proaktif dalam melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. DPRD diharapkan dapat menetapkan dua hal pokok, yaitu: (1) Arah dan kebijakan umum DPRD dan (2) Strategi dan prioritas APBD.

## **2). Desentralisasi Wewenang ke Level Unit Kinerja Sebagai Pusat Pertanggungjawaban.**

Desentralisasi wewenang dan tanggung jawab tidak akan berarti banyak, jika sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai wewenang dan tanggungjawab yang diberikan tersebut masih dipegang oleh pemberi wewenang dan tanggung jawab tersebut. Pada akhirnya pemegang sumber dana yang akan menjadi penentu apa yang akan dilaksanakan. Desentralisasi anggaran dalam hal ini dilaksanakan dengan mengalokasikan sejumlah tertentu dana kepada unit kerja tersebut untuk mengelola sumber dana yang ada. Peranan pihak yang lebih tinggi dalam hal ini hanya sebagai Pembina, tetapi tidak memegang kendali dalam pendistribusian dana tersebut. Dengan desentralisasi anggaran pada unit kerja ini, akan memungkinkan unit kerja untuk mengalokasikan anggaran yang dimiliki sesuai dengan skala prioritas dan preferensinya.

Desentralisasi anggaran pada unit kerja akan memungkinkan unit kerja tersebut untuk berlaku hemat, efisien, dan efektif. Desentralisasi anggaran memungkinkan setiap unit kerja untuk tidak selalu menghabiskan seluruh anggaran yang tersedia dan memungkinkan mereka dalam kondisi tertentu untuk mengalihkan dana yang dimilikinya dari satu

mata anggaran ke mata anggaran yang lain dalam batas koridor yang dimungkinkan.

## **5. Proses Penyusunan Anggaran Kinerja**

Aspek-aspek penting sebagai persyaratan teknik dalam penyusunan anggaran kinerja adalah bahwa setiap unit kerja harus mempunyai: (1) Tupoksi; (2) Tujuan dan sasaran pokok; (3) Program dan kegiatan; (4) Indikator kinerja (satuan ukur); dan (5) Target kinerja.

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Unit Kerja**

Tugas pokok dan fungsi merupakan perumusan penugasan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Tupoksi juga merupakan tanggung jawab unit kerja yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, masing-masing unit kerja harus membuat deskripsi yang jelas tentang Tupoksi dan kejelasan misi unit kerja untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) tugas dan tanggung jawab antar unit kerja.

### **2. Tujuan dan Sasaran Pokok**

Tujuan dan sasaran pokok yang diinginkan harus merupakan perwujudan prioritas Tupoksi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pokok membuat gambaran mengenai hal-hal yang ingin dicapai unit kerja dalam jangka waktu tertentu (satu tahun anggaran).

Perumusan tujuan unit kerja hendaknya sesuai dengan Misi dan Tupoksi unit kerja, mudah dijabarkan dan jelas namun tidak terlalu kaku,

bersifat kualitatif dan masih relatif umum sehingga memberi “ruang” bagi para staf atau karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam mencapai tujuan unit kerja. Di samping itu juga harus konsisten dengan hirarki tujuan pada tingkat yang lebih tinggi.

Sedangkan sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai, dihasilkan oleh unit kerja dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus dirumuskan dan diidentifikasi dengan jelas, dapat memberi makna, lebih spesifik/mengarah pada satu sasaran (bersifat kuantitatif), serta yang terpenting dapat diukur dan dievaluasi.

### 3. Program dan Kegiatan

Program harus terkait dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk rencana kerja berupa kegiatan-kegiatan. Program harus memiliki *scope* atau ruang lingkup pelayanan/ kegiatan dan jangka waktu pelaksanaan yang jelas. Untuk mencapai sasaran dapat dipergunakan lebih dari satu program, yaitu:

- a. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
- b. Memiliki ruang lingkup pelayanan/ kegiatan yang jelas.
- c. Memiliki jangka waktu pelaksanaan yang jelas.
- d. Dapat dievaluasi dan ditentukan target kinerjanya.
- e. Dirumuskan secara logis, dalam arti harus mempertimbangkan kondisi sumber daya untuk melaksanakan program tersebut.

Sedangkan usulan kegiatan atau biasa juga disebut sebagai rencana tindakan (*action plan*) merupakan rincian lebih lanjut dari program yang telah disusun. Untuk setiap kegiatan, harus sudah terinci dan teridentifikasi nama, tujuan, sasaran, target kinerja, biaya rata-rata dan pengalokasian anggarannya.

#### 4. Indikator Kinerja (Satuan Ukur)

Satuan ukur didasarkan pada Tupoksi unit kerja. Satuan ukur merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh unit kerja mampu melaksanakan Tupoksinya. Idealnya, satuan ukur terkait dengan efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa satuan ukur unit kerja harus: 1) berupa angka numerik; 2) dapat diperbandingkan; dan 3) cukup spesifik. Hal tersebut dimaksudkan agar kinerja unit kerja dapat diperbandingkan dengan indikator kinerja atau kinerja unit kerja yang lain, dan sekaligus dapat digunakan untuk melihat indikasi masalah unit kerja yang muncul. Secara lebih mikro lagi, satuan ukur tidak terbatas hanya pada unit kerja, akan tetapi setiap kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan harus memiliki satuan ukur sendiri-sendiri.

#### 5. Target Kinerja

Agar tujuan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan berjalan secara efektif diperlukan sejumlah target kinerja. Target kinerja merupakan sekumpulan satuan ukur yang diharapkan dapat dicapai oleh unit kerja dalam periode tertentu (angka numerik/ kuantitatif) dan dapat

dipergunakan untuk mengukur target/ sasaran pencapaian kinerja yang diinginkan oleh suatu unit kerja pada periode waktu tertentu. Penentuan target kinerja yang ideal setidaknya harus menggunakan satuan ukur yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari masing-masing unit kerja.

## **6. Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah**

Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan (Mardiasmo, 2002:192): Standar Analisa Belanja (SAB), Tolak Ukur Kinerja, dan Standar Biaya.

### **1). Standar Analisa Belanja (SAB)**

Standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Tujuan SAB (Mardiasmo, 2002:192):

1. Meningkatkan kemampuan Unit Kerja dalam menyusun anggaran.
2. Mencegah adanya duplikasi dan atau tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanjanya pada masing-masing Unit Kerja.
3. Menjamin kesesuaian antara kegiatan dan anggaran.

Manfaat SAB (Mardiasmo, 2002:193):

1. Pemerintah Daerah dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan Tupoksinya.
2. Pemerintah Daerah dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.

3. Menghindari tumpang tindih antara pengeluaran rutin dan pembangunan.
4. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.
5. Unit Kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

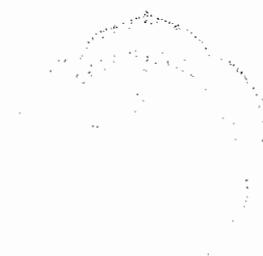
## **2). Tolak Ukur Kinerja**

Yang dimaksud dengan tolak ukur kinerja (Mardiasmo, 2002:196) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. Satuan ukur merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh Unit Kerja mampu melaksanakan Tupoksinya. Tolak ukur kinerja ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang ditentukan oleh masing-masing daerah.

Satuan ukur terkait dengan efisiensi biaya (pengeluaran) dan kualitas pelayanan. Alokasi biaya harus dikaitkan dengan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

## **3). Standar Biaya**

Standar biaya merupakan komponen lain yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja, selain SAB dan tolak ukur kinerja. Standar biaya (PAU SE UGM, 2003) adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang bersangkutan. Pengembangan standar biaya



harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing daerah.

## 7. Analisis APBD Berbasis Kinerja

Penilaian anggaran berbasis kinerja diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat yaitu dengan melakukan analisis varians. Analisis varians dilakukan dengan membandingkan selisih atau perbedaan antara realisasi (kinerja aktual) dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2002:123).

Analisis varians berfokus pada (Mardiasmo, 2002:123):

- a) Varians pendapatan (*revenue variance*)
- b) Varians pengeluaran (*expenditure variance*)

Dari hasil analisis varians, kemudian dinyatakan dalam bentuk prosentase antara realisasi dengan yang dianggarkan (Nugroho, 2003:32).

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Dari hasil analisis varians dapat diketahui (PAU SE-KP, 2003), yaitu:

- a) Rencana anggaran pendapatan lebih besar dari pada realisasi, maka selisihnya bersifat menurun. Sedangkan pada pengeluaran/ belanja jika anggaran lebih besar daripada sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya bersifat menguntungkan.
- b) Rencana anggaran pendapatan sama dengan realisasi, maka selisihnya bersifat sama. Sedangkan pada pengeluaran/ belanja jika sama dengan sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya sama dengan nol (0). Artinya bahwa dalam mencapai suatu tujuan dengan biaya yang

semaksimal mungkin dan dalam waktu atau periode yang sesingkat-singkatnya, dapat diharapkan hasil yang sebesar-besarnya. Jika dikaitkan dengan efisiensi anggaran belanja, dapat diartikan usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan sudah efisien.

- c) Rencana anggaran pendapatan lebih kecil daripada realisasi, maka selisihnya naik. Sedangkan pada pengeluaran/ belanja jika anggaran lebih kecil dari pada sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya bersifat tidak menguntungkan.

Laporan perhitungan APBD memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD yang dianggarkan. Yang dimaksud adalah selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. (Mardiasmo, 2003).

#### **7. Laporan Kinerja Keuangan (Surplus-Defisit)**

Dalam perusahaan bisnis, laporan ini biasa disebut laporan laba-rugi. Laporan surplus defisit adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas (Pemerintah Daerah) dalam satu periode akuntansi. Kinerja dalam hal ini digambarkan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menciptakan surplus. Sedangkan dalam akuntansi, surplus atau defisit merupakan selisih dari seluruh pendapatan dan seluruh biaya. Ketika total pendapatan lebih besar daripada total biaya maka terjadi surplus. Ketika total biaya lebih besar dari pada total pendapatan, maka terjadi defisit. (Indra Bastian dan Soepriyanto, 2002:179).

Laporan surplus defisit berguna untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi ini berguna untuk memprediksi dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Lebih lanjut, laporan surplus defisit berguna dalam menilai efektifitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. (Mardiasmo, 2003).

#### **D. Efisiensi**

##### **1. Efisiensi APBD**

Efisiensi menurut Jones dan Pendlebury (1996), adalah suatu perbandingan atau rasio antara *output* dengan *input*. Baswir (1993: 176) menyatakan rasionalitas hampir selalu berkaitan dengan efisiensi, artinya secara ekonomis suatu tindakan dikatakan rasional bilamana tindakan itu ada kaitannya dengan usaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Efisiensi dapat dilihat dari segi *output* (hasil) saja atau dari segi *input* (pengorbanan) saja. Dari segi hasil, efisiensi berorientasi pada produktivitas, sedangkan dari segi pengorbanan, maka efisiensi berorientasi pada penghematan (Syamsi Ibnu, 1991:12).

Berkaitan dengan kedua hal tersebut, maka di dalam proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasikan hasil melalui pengukuran efisiensi serta pencapaian tujuan efektifitas.

##### **2. Analisis Efisiensi**

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/ proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*. Analisis yang dilakukan

terhadap kinerja keuangan daerah dengan menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total pendapatan daerah dikalikan seratus (100) dalam bentuk persentase (Mardiasmo, 2001:8):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan yang menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah. Adapun kriteria penilaian kinerja yang diukur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
Kriteria Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Dari tabel kriteria kinerja keuangan tersebut di atas maka, usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan dikatakan efisien jika persentase kinerja keuangannya antara 60%-80%. Sebaliknya dikatakan tidak efisien jika persentase kinerja keuangannya berada di atas 100%.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian tentang objek tertentu pada suatu perusahaan, dalam hal ini pada Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2004.

#### **2. Tempat dan Waktu Penelitian.**

Tempat : Pemerintah Kabupaten Agam

Waktu : April - Juni 2005

#### **3. Subjek dan Objek Penelitian.**

- Subjek dalam penelitian ini adalah semua yang berhubungan dengan penyusunan APBD yaitu manajer umum/ pimpinan, Kepala Unit, Kepala Bagian.
- Objek penelitian ini adalah laporan perhitungan anggaran yaitu laporan yang menggambarkan antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD diawal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD diakhir periode.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data.**

- a) Observasi (Golu, 2002:116) adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap hal-hal yang dipandang perlu dan ada hubungannya dengan permasalahan pokok atau objek yang diteliti yaitu tentang proses penyusunan APBD berbasis

kinerja di Kabupaten Agam dari awal pelaksanaan sampai pada hasil yang diperoleh dari APBD berbasis kinerja.

- b) Wawancara (Golu, 2002:119) adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Teknik wawancara dilakukan kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Agam.
- c) Dokumentasi (Golu, 2002:123) adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.

#### **4. Teknik Analisa Data.**

1. Permasalahan pertama, dengan melihat hasil dari penerapan APBD berbasis kinerja di Kabupaten Agam.

Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data hasil penelitian yaitu Laporan Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Melakukan analisis varians.

Analisis varians dilakukan dengan membandingkan selisih atau perbedaan antara realisasi (kinerja aktual) dengan yang dianggarkan. Analisis varians berfokus pada varians pendapatan dan varians pengeluaran.

Dari hasil analisis varians tersebut, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase antara realisasi anggaran dengan yang dianggarkan yaitu:

$$\text{Varians} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Lebih jelasnya dilakukan dengan menggunakan tabel analisis varians dibawah ini:

Tabel 3.1

## Analisis Varians

No	Uraian	Jumlah		Varians (selisih)	%	Kesimpulan
		Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7

3) Menarik kesimpulan dari hasil analisis varians yaitu:

a). Pada pos pendapatan, jika rencana anggaran pendapatan > dari pada realisasi, maka realisasinya lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada pos pengeluaran/ belanja, jika anggaran > daripada sesungguhnya terjadi (aktual), maka realisasinya turun dari anggaran yang telah ditetapkan diartikan menguntungkan.

b). Pada pos pendapatan, jika rencana anggaran pendapatan = dengan realisasi, maka rencana anggaran dengan realisasi adalah sama. Pada pos pengeluaran/ belanja, jika anggaran = sesungguhnya terjadi (aktual), maka selisihnya sama dengan nol (0).

c). Pada pos pendapatan, jika rencana anggaran pendapatan < daripada realisasi, maka realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada pos pengeluaran/ belanja, jika anggaran < dari pada sesungguhnya terjadi (aktual), maka realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan diartikan tidak menguntungkan.

2. Permasalahan kedua, dengan menentukan tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah Kabupaten Agam tahun anggaran 2004.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data hasil penelitian yaitu Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Melakukan analisis efisiensi.

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/ proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*. Yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dengan total pendapatan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase (Mardiasmo, 2001:8):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran Rutin}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran rutin dan realisasi pendapatan yang menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat diketahui kinerja keuangan daerah.

Adapun kriteria penilaian kinerja yang diukur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2  
Kriteria Kinerja Keuangan

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2). Menarik kesimpulan dari hasil analisis yaitu:

Usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan sudah efisien dengan tingkat persentase kinerja keuangannya antara 60%-80%. Sebaliknya dikatakan tidak efisien jika persentase kinerja keuangannya berada di atas 100%.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **I. Sejarah Kabupaten Agam**

Kabupaten Daerah Tingkat II Agam mempunyai sejarah yang panjang dibidang Pemerintahan dimana pada Pemerintahan Kerajaan Minang Kabau merupakan salah satu “Luhak Agam” yang daerahnya meliputi Daerah Kabupaten Agam dan Daerah Kabupaten Pasaman sekarang ini.

Dalam Pemerintahan Kolonial Belanda, luhak Agam diubah statusnya menjadi “Afdeling Agam” yang meliputi Order Distrik Agam Tua, Order Distrik Maninjau dan Order Distrik Talu.

Pada permulaan Kemerdekaan RI tahun 1945 bekas Daerah Afdeling Agam diubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga kewedanaan masing-masing Kewedanaan Agam Tua, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu.

Dengan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 tahun 1949 Daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukkan Ke Daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa Nagari disekitar Kota Bukittinggi dialihkan kedalam lingkungan Administrasi Kotamadya Bukittinggi.

Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam.

## 2. Keadaan Geografis

Kabupaten Agam merupakan salah satu dari 15 Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Barat dengan keadaan geografis meliputi perbukitan pada bagian timur dan dataran rendah pada bagian barat. Luas wilayah Kabupaten Agam seluruhnya mencapai 2.232,30 km<sup>2</sup>. yang berarti hanya 5,25% dari luas Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 km<sup>2</sup>.

Lokasi Kabupaten Agam terletak dibagian barat wilayah Propinsi Sumatera Barat yaitu 00°2' - 00°29' Lintang Selatan dan 99°52' - 100°23' Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Barat dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur dengan Kabupaten 50 Kota.

Secara administratif Kabupaten Agam terdiri atas 15 Kecamatan yang dibagi dalam 73 nagari dan 224 jorong. Kecamatan yang paling jauh adalah Kecamatan Palupuah dengan jarak 91 km dari ibu kota Kabupaten dan merupakan daerah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Agam terbagi dalam 2 wilayah yaitu timur dan barat, yang dihubungkan oleh *kelok 44*. Wilayah timur meliputi: Kecamatan Baso, Kecamatan IV Angkek, Kecamatan Canduang, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Sungai Puar, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Palupuah, Kecamatan IV Koto. Di wilayah barat meliputi: Kecamatan Matua, Kecamatan Palembayan, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Tanjung Mutiara.

Di Kabupaten Agam terdapat dua gunung yaitu Gunung Merapi di Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Sungai Puar dengan ketinggian 2.891 m dan Gunung Singgalang di Kecamatan IV Koto dengan ketinggian 2.164 m, serta terdapat satu buah danau yaitu Danau Maninjau di Kecamatan Tanjung Raya dengan luas 9.950 ha dengan kedalaman mencapai 157 m dan keliling danau sepanjang 66 km.

### **3. Keadaan Penduduk**

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 2004, jumlah penduduk Kabupaten Agam mencapai 434.791 orang dengan kepadatan rata-rata 187 orang per km<sup>2</sup>. Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki yaitu 208.323 orang dan perempuan 226.568 orang. Dengan demikian ratio jenis kelamin tercatat sekitar 92 persen. Jumlah penduduk terbanyak menurut Kecamatan terdapat di Kecamatan Lubuk Basung yaitu 76.777 jiwa, sedangkan Kecamatan Palupuah merupakan daerah yang paling sedikit penduduknya yaitu 14.966 jiwa.

Sesuai dengan luas wilayah, Kecamatan Banuhampu Sungai Puar merupakan daerah terpadat penduduknya dengan kepadatan rata-rata 732 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Palupuah merupakan Kecamatan terjarang penduduknya yakni dengan kepadatan per km<sup>2</sup> hanya 63 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2004 mencapai 0,18%.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Agam sebagian besar adalah sebagai petani, dengan demikian sampai saat ini Kabupaten Agam masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penyumbang bagi pendapatan penduduk. Dari tahun ke tahun PRDB Kabupaten Agam menunjukkan peningkatan, kecuali

pada tahun 1997/1998 menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan oleh dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Potensi daerah yang cukup besar kotribusinya terhadap PAD adalah sektor pertanian.

#### 4. Pemerintahan

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Agam dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, hingga bulan Desember 2004, Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Agam seluruhnya berjumlah 7.338 orang terdiri dari golongan I 211 orang, golongan II 1.227 orang, golongan III 4.932 orang dan golongan IV sebanyak 968 orang.

Tabel 4.1  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Dalam Lingkungan Pemda Tingkat II Agam  
Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah	Prosentase
	1	2	3
1	Golongan I	211	2,88
2	Golongan II	1.227	16,72
3	Golongan III	4.932	67,21
4	Golongan IV	968	13,19
	Total	7.338	100

Dilihat dari tingkat pendidikan personil yang ada pada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Agam, yang terbanyak adalah lulusan Diploma III (D-III) 2.738, tingkat pendidikan setingkat dengan SLTA, yaitu 2.297 orang, Sarjana (S-1) 1.911 orang, dan Pasca Sarjana (S-2) 47 orang.

Tabel 4.2  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil  
Dalam Lingkungan Pemda Tingkat II Agam  
Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
	1	2	3
1	Sekolah Dasar	232	3,12
2	SLTP	214	2,88
3	SLTA	2.297	30,88
4	Sarjana Muda/ Akademi	2.738	36,82
5	Sarjana (S-1)	1.911	25,69
6	Pasca Sarjana (S-2)	47	6,32

## 5. Sosial

### • Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas sesuai dengan visi pendidikan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Sarana pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Agam selama tahun 2004 relatif sama dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Jumlah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk Negeri dan Swasta pada tahun 2004 masing-masing tercatat sebanyak 454 sekolah, 50 sekolah, 24 sekolah, dan 4 sekolah. Sedangkan pada tahun 2003 masing-masingnya tercatat sebanyak 466 sekolah, 49 sekolah, 18 sekolah, dan 5 sekolah.

- **Kesehatan**

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu untuk berperilaku sehat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan tersebut, diukur dengan beberapa indikator antara lain menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian anak balita, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan meningkatnya status gizi masyarakat.

Agar kondisi kesehatan penduduk dapat meningkat, maka penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan harus memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

Pada tahun 2004, jumlah puskesmas yang ada menurut Kecamatan di Kabupaten Agam menunjukkan bahwa Kecamatan Lubuk Basung memiliki jumlah puskesmas yang terbanyak yaitu sekitar 20 unit

(termasuk puskesmas pembantu), sedangkan Kecamatan yang jumlah puskesmasnya terkecil, yaitu Kecamatan Palupuh sebanyak 7 unit.

## **6. Keuangan**

Dalam membangun ekonomi kerakyatan, permasalahan utama adalah menyangkut pemberdayaan aktivitas ekonomi masyarakat itu sendiri sesuai dengan lapangan usaha yang telah digelutinya. Secara garis besar pembangunan ekonomi tersebut ditujukan kepada peningkatan produksi, kualitas hasil, pengembangan usaha dan kelembagaan serta pemasaran.

Untuk mewujudkan pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat ini, selama periode tahun 2000-2004 dilakukan melalui kebijakan:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki.
2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan industri kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang pemasaran dan permodalan.
3. Mengembangkan iklim persaingan yang sehat dan menghindarkan berbagai bentuk distorsi pasar yang merugikan masyarakat.
4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi secara bersama dengan pemerataan.
5. Mempercepat proses pemulihan ekonomi dengan meningkatkan peranan sektor riil melalui usaha-usaha pemanfaatan sumber daya lokal.
6. Meningkatkan kinerja keuangan daerah.

7. Peningkatan efisiensi pengeluaran melalui sistem pengawasan dan pemantauan keuangan daerah.
8. Pengentasan kemiskinan.

Untuk mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi rakyat melalui kebijakan dan program sebagaimana tersebut diatas tidak terlepas dari anggaran yang dialokasikan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004, dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pendapatan ..... Rp 270.517.104.264,77
2. Belanja ..... Rp 275.310.004.264,77

Berikut disampaikan secara ringkas realisasi pendapatan dan belanja yang telah dialokasikan pada APBD tahun 2004 setelah mengalami perubahan.

Pada tahun anggaran 2004 ini, Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 270.517.104.264,77 dapat direalisasi Rp. 280.170.258.107,15 atau 103,57% yang bersumber dari 3 (tiga) komponen pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang diperkirakan sebesar Rp 11.316.908.282,00 dapat direalisasi sebesar 116,70% atau sebesar Rp 13.206.958.035,00. Dari 4 (empat) sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, 2 (dua) diantaranya dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2004 yang diperkirakan berjumlah Rp 215.629.371.420,00 dapat direalisasi sebesar Rp 220.837.746.040,00 atau 102,42%. Terlampauinya rencana penerimaan ini berkat koordinasi insentif yang dilakukan dengan baik antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Provinsi, sehingga Bagi Hasil Pajak Pusat, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dapat direalisasikan melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu sumber pendapatan daerah lainnya yakni Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang juga merupakan penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, pada tahun 2004 dapat direalisasi sebesar Rp 13.305.114.000,00 yang sesuai dengan targetnya yaitu Rp 13.305.114.000,00.

Pada Tahun 2004, alokasi Anggaran Belanja Daerah yang semula dari Rp. 275.310.004.264,77 hanya direalisasi sebesar Rp. 242.044.945.307,15 atau 87,92%.

Belanja Administrasi Umum sebesar Rp 192.795.787.225,00 dengan realisasi Rp 168.374.480.809,00 atau 87,33%. Belanja ini dimanfaatkan untuk Belanja Aparatur Daerah yang terdiri dari belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Belanja Pelayanan Publik.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan, yaitu belanja langsung, dengan pengertian belanja yang timbul akibat adanya suatu kegiatan tertentu yang tidak berbentuk investasi sebesar Rp 44.486.453.013,00 dengan realisasi 89,93% atau sebesar Rp 40.004.778.219,00.

Belanja Modal, yaitu belanja langsung yang digunakan untuk membiayai belanja investasi yang menyebabkan bertambahnya asset daerah sebesar Rp 21.624.025.978,00 dengan realisasi Rp 18.495.718.478,00 atau 85,53%.

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp 14.903.737.553,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.263.857.553,00 antara lain untuk Dana Alokasi Umum Nagari, pengentasan kemiskinan, “goro badunsanak”, dan sebagainya.

Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp 1.500.000.495,00 dengan realisasi Rp 906.110.248,15 atau 60,41% terutama untuk penanggulangan bencana alam.

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja di Kabupaten Agam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data target dan realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam, target dan realisasi pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan untuk Tahun Anggaran 2004. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2004, meliputi Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Laporan Surplus-Defisit dan Laporan Perhitungan Anggaran.

Neraca Daerah menggambarkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Agam pada suatu tanggal tertentu, ditinjau dari sudut aktiva, kewajiban dan ekuitas. Laporan Arus Kas menyajikan informasi perubahan aktiva bersih, struktur keuangan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Laporan Surplus-Defisit berguna untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD.

Berikut adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam:

**Tabel 5.1**  
**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**NERACA DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 2004**  
**(Rupiah)**

URAIAN	NERACA Per 31 Des'03	NERACA Per 31 Des'04	URAIAN	NERACA Per 31 Des'03	NERACA Per 31 Des'04
<b>Aktiva Lancar</b>			<b>Utang Jangka Pendek</b>		
Kas dan Bank	31.881.112.522,77	24.619.812.479,77	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	835.291.519,00	702.928.002,00
Piutang Pajak	1.101.119.213,67	575.987.909,00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	279.363.153,00	507.486.339,00
Piutang Lain-lain	12.099.850,00	21.306.250,00			
Persediaan	2.579.232.364,68	3.375.114.500,00			
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>35.573.563.951,12</b>	<b>28.592.221.138,77</b>	<b>Jumlah Utang Jangka Pendek</b>	<b>1.114.654.672,00</b>	<b>1.210.414.341,00</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>			<b>Utang Jangka Panjang</b>		
Investasi Dalam Saham	4.475.861.000,00	6.475.861.000,00	Pinjaman Dalam Negeri	223.483.464,00	265.050.252,00
Investasi Jangka Panjang Lainnya	1.440.732.292,00	1.440.732.292,00			
<b>Jumlah Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>5.916.593.292,00</b>	<b>7.916.539.292,00</b>	<b>Jumlah Utang Jangka Panjang</b>	<b>223.483.464,00</b>	<b>265.050.252,00</b>
<b>Aktiva Tetap</b>			<b>JUMLAH UTANG</b>	<b>1.338.138.136,00</b>	<b>1.475.464.593,00</b>
Tanah	20.210.526.015,00	20.260.726.015,00	<b>Ekuitas Dana</b>		
Jalan dan Jembatan	152.138.664.942,00	160.573.288.425,00	Ekuitas Dana Umum	397.022.387.881,75	409.432.210.101,40
Bangunan Air (Irigasi)	4.131.076.494,00	4.131.076.494,00			
Intalasi dan Jaringan	642.706.864,00	1.091.269.864,00	<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>397.022.387.881,75</b>	<b>409.432.210.101,40</b>
Gedung	140.159.350.742,33	143.148.299.322,33			
Mesin dan Peralatan	8.318.936.206,50	9.988.934.956,50			
Kendaraan	11.590.968.739,00	13.194.518.739,00			
Meubelair dan Perlengkapan	16.438.470.928,80	18.587.751.238,80			
Buku/Perpustakaan	2.577.091.546,00	2.760.418.912,00			
Barang Bercorak Seni dan Budaya	662.576.297,00	662.576.297,00			
<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>356.870.368.774,63</b>	<b>374.398.860.263,63</b>			
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>398.360.526.017,75</b>	<b>410.907.674.694,40</b>	<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>398.360.526.017,75</b>	<b>410.907.674.694,40</b>

Sumber: Data Sekunder Bagian Pemerintahan Kabupaten Agam, 2004

**B. Penjelasan Pos Neraca Per 31 Desember 2004**

## 1. Kas dan Bank Rp. 24.619.812.479,77

Jumlah tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2004, dengan rincian:

a.	Kas Daerah	: Rp. 1.548.819.780,58
b.	UUDP TA. 2004	: Rp. 2.747.146.836,11
c.	Dana Alokasi Umum	: Rp. 4.461.038.011,00
d.	Dana Alokasi Khusus	: Rp. 834.027.730,00
e.	Rekening Pembayaran Gaji	: Rp. 8.995.638.790,00
f.	Dana Penyeimbang	: Rp. 399.818.938,00
g.	Sisa DAU-DAK-DR	: Rp. 305.258.088,00
h.	Sisa Dana Pada BNI 46	: Rp. 115.570.080,00
i.	Sisa Dana HWK	: Rp. 212.494.226,00
j.	Deposito Pada BNI 46	: Rp. 5.000.000.000,00

## 2. Piutang Pajak Rp. 575.987.909,00

Merupakan saldo tagihan Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004 atas Pajak Daerah yang terdiri dari:

a.	Pajak Penerangan Jalan dari	: Rp. 514.507.921,00
b.	PLN	: Rp. 42.543.328,00
c.	Pajak Hotel dan Restoran	: Rp. 18.936.660,00

## 3. Piutang lain-lain Rp. 21.306.250,00

Merupakan saldo tagihan Pemerintah Kabupaten Agam kepada Pihak Ketiga lainnya per 31 Desember 2004, terdiri dari:

a. Piutang IMB	: Rp. 7.145.600,00
b. Sewa Rumah Dinas	: Rp. 290.000,00
c. Retribusi pada RSUD Lubuk Basung	: Rp. 1.170.650,00
d. Piutang Sewa Alat Berat	: Rp. 12.700.000,00

## 4. Persediaan Rp. 3.375.114.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo barang/persediaan per 31 Desember 2004, terdiri dari:

a. Dinas Kesehatan	: Rp. 3.070.090.900,00
b. Persediaan Badan	: Rp. 305.023.600,00

## 5. Investasi Dalam Saham Rp. 6.475.861.000,00

Jumlah tersebut merupakan investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Agam pada Bank Nagari Sumatera Barat, terdiri dari:

a. Saham Prioritas 24.656 lembar	: Rp. 2.465.600.000,00
b. Saham Biasa 2.010.261 lembar	: Rp. 2.010.261.000,00
c. Rekening Antara Modal	: Rp. 2.000.000.000,00

## 6. Investasi Jangka Panjang Rp. 1.440.732.292,00

Jumlah tersebut merupakan investasi jangka panjang lainnya Pemerintah Kabupaten Agam pada perusahaan daerah per 31 Desember 2004, dengan rincian:

- a. PDAM Kabupaten Agam : Rp. 212.000.000,00
- b. Perusahaan Daerah PT. Agam Karya Prima : Rp. 560.000.000,00
- c. Yayasan Purna Bakti (YARNATI) : Rp. 220.000.000,00
- d. SIKOMDAGRI : Rp. 175.000.000,00
- e. MAPPADA : Rp. 273.000.000,00

7. Tanah Rp. 20.260.726.015,00

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan atas Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam pe 31 Desember 2004, yang terdiri dari:

- a. Tanah Untuk Bangunan Gedung : Rp. 20.210.716.015,00
- b. Tanah Bukan Untuk Bangunan : Rp. 50.000.000,00

8. Jalan dan Jembatan Rp. 160.573.288.425,00

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan atas jalan dan jembatan serta renovasi trotoar/drainase yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004.

9. Bangunan Air (Irigasi) Rp. 4.131.076.494,00

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan atas bangunan air (irigasi) yang terdiri dari perbaikan dan rehab jaringan dan irigasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004.

10. Instalasi dan Jaringan Rp. 1.091.269.864,00

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan atas instalasi dan jaringan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004, yang terdiri dari instalasi dan jaringan, jaringan telepon (infokom), jaringan komputer, jaringan air bersih (PU).

## 11. Gedung Rp. 143.148.299.322,33

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan atas gedung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004, yang terdiri dari:

a. Pembangunan / Rehab Gedung	: Rp. 140.159.350.742,33
b. Bangunan Terminal	: Rp. 68.732.855,00
c. Bangunan Tugu Peringatan	: Rp. 57.926.225,00
d. Lain-lain Bangunan bukan Gedung	: Rp. 65.741.000,00
e. Pembangunan Gedung Tempat Kerja	: Rp. 985.253.900,00
f. Gedung Penggunaan Lain	: Rp. 196.932.000,00
g. Rambu-rambu	: Rp. 48.600.000,00
h. Bangunan Sekolah	: Rp. 1.494.262.600,00
i. Bangunan Bukan Gedung	: Rp. 71.500.000,00

## 12. Mesin dan Peralatan Rp. 9.988.934.956,50

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan atas mesin dan peralatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004 yang terdiri dari:

a. Mesin dan Peralatan	: Rp. 48.318.936.206,50
b. Alat Komunikasi	: Rp. 151.042.300,00
c. Persenjataan Non Senjata Api	: Rp. 1.500.000,00
d. Alat Studio	: Rp. 8.100.000,00
e. Alat Labor Non Kesehatan	: Rp. 28.415.000,00
f. Peralatan Pembibitan	: Rp. 15.965.000,00
g. Modal Kamera	: Rp. 11.800.000,00
h. Alat Studio dan Komunikasi	: Rp. 2.000.000,00



i. Alat-alat Kesehatan	: Rp. 599.447.550,00
j. Alat Peraga Praktek Sekolah	: Rp. 79.800.000,00
k. Pembenihan Perikanan	: Rp. 12.299.900,00
l. Alat-alat Besar	: Rp. 759.629.000,00

13. Kendaraan Rp. 13.194.518.739,00

Jumlah tersebut merupakan nilai atas perolehan Kendaraan, alat angkutan darat roda 4, dan alat angkutan darat roda 2 yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004.

14. Meubelair dan Pelengkapan Rp. 18.587.751.238,80

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan atas meubelair dan pelengkapan, alat kantor, meja dan kursi, perlengkapan komputer, mesin tik, komputer, lemari, alat kantor lainnya, AC, printer, alat kebersihan, sarana-sarana perkantoran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004.

15. Buku/ Perpustakaan Rp. 2.760.418.912,00

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan berupa buku perpustakaan, pembelian buku, serta buku pegangan sekolah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004.

16. Barang Bercorak Seni dan Budaya Rp. 662.576.297,00

Jumlah tersebut merupakan barang bercorak seni dan budaya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004.

17. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp. 702.928.002,00

Jumlah tersebut merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi beserta bunganya yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004, yang terdiri dari utang pembangunan pasar sebanyak empat lokasi melalui BRI dengan pokok utang.

18. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Rp. 507.486.339,00

Jumlah tersebut merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004.

19. Pinjaman Dalam Negeri Rp. 265.050.252,00

Utang jangka panjang Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004 terdiri dari utang jangka panjang pembangunan baru rumah Dinas Pemda Agam dengan BTN cabang Padang.

20. Ekuitas Dana Umum Rp. 409.432.210.101,40

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2004.

Tabel 5.2  
**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**LAPORAN ALIRAN KAS**  
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2004  
 (Rupiah)

URAIAN	JUMLAH (Rupiah)
<b>A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
<b>Aliran kas masuk dari aktivitas operasi</b>	
- Pendapatan Asli Daerah	13.206.958.035,00
- Pendapatan dari Dana Perimbangan	220.837.746.040,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.305.114.000,00
Jumlah	247.349.818.075,00
<b>Aliran kas keluar dari aktivitas operasi</b>	
<b>Aparatur Daerah:</b>	
- Belanja Administrasi dan Umum	56.741.732.914,00
- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	9.113.665.747,00
Jumlah	65.855.398.661,00
<b>Pelayanan Publik:</b>	
- Belanja Administrasi dan Umum	111.632.747.905,00
- Belanja Operasi dan Pemeliharaan	30.891.112.472,00
- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	14.263.857.553,00
- Belanja Tidak Tersangka	906.110.248,15
Jumlah	157.693.828.178,15
<b>Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>23.800.591.235,85</b>
<b>B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
<b>Aliran Kas Masuk dari Aktivitas Investasi</b>	
- Bagian laba Perusahaan Daerah	2.000.000.000,00
<b>Aliran Kas Keluar dari Aktivitas Investasi</b>	
- Belanja Modal	18.495.718.478,00
- Pembelian Investasi Jangka Panjang/Deposito	5.000.000.000,00
Jumlah	23.495.718.478,00
<b>Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(21.495.718.478,00)</b>
<b>C. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>	
<b>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan</b>	
- Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu	454.717.591,00

Tabel lanjutan

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rupiah)</b>
<b>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan</b>	
- Penyertaan Modal	2.000.000.000,00
- Pembayaran Hutang	120.775.581,00
Jumlah	2.120.775.581,00
<b>Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(1.666.057.990,00)</b>
<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	<b>638.814.767,85</b>
<b>Saldo Awal Kas</b>	<b>31.884.382.666,77</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>31.245.567.898,92</b>

Sumber: Data Sekunder Bagian Pemerintahan Kabupaten Agam, 2004

**Tabel 5.3**  
**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**RINGKASAN PERHITUNGAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2004**  
**(Rupiah)**

No	Uraian	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	30.265.710.559,77	32.820.440.032,15
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.316.908.285,00	13.206.958.035,00
3	DANA PERIMBANGAN	215.629.371.420,00	220.837.746.040,00
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	13.305.114.000,00	13.305.114.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>270.517.104.264,77</b>	<b>280.170.258.107,15</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>		
1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	192.795.787.225,00	168.374.480.809,00
2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	44.486.453.013,00	40.004.778.219,00
3	BELANJA MODAL	21.624.025.978,00	18.495.718.478,00
4	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	14.903.737.553,00	14.263.857.553,00
5	BELANJA TIDAK TERSANGKA	1.500.000.459,77	906.110.248,15
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>275.310.004.228,77</b>	<b>242.044.945.307,15</b>

Sumber: Data Sekunder Bagian Pemerintahan Kabupaten Agam, 2004

**Tabel 5.4**  
**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**Laporan Surplus Defisit**  
**untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2004**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	13.206.958.035,00
DANA PERIMBANGAN	220.837.746.040,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	13.305.114.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>247.349.818.075,00</b>
<b>BELANJA</b>	
BELANJA ADMINISTRASI UMUM	168.374.480.809,00
BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	40.004.778.219,00
BELANJA MODAL	18.495.718.478,00
BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	14.263.857.553,00
BELANJA TIDAK TERSANGKA	906.110.248,15
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>242.044.945.307,15</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>5.304.872.767,85</b>

Sumber: Data Sekunder Bagian Pemerintahan Kabupaten Agam, 2004

### **C. Analisis Data**

Tahap setelah operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Dimilikinya pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi.

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai pada anggaran yang telah dibuat daerah dengan menganalisis perbedaan antara realisasi dengan target yang dianggarkan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sehingga nantinya dapat dihasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi tertentu sesuai dengan kriteria penilaian kinerja keuangan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini penulis hanya melakukan penilaian laporan kinerja keuangan yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

1. Hasil penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berbasis kinerja di Kabupaten Agam.

Berikut langkah-langkah analisis varians:

- 1) Mengumpulkan data mengenai Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004:

**Tabel 5.5**  
**Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Tahun 2004**  
**(Rupiah)**

No	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	30.265.710.559,77	32.820.440.032,15
2	Pendapatan Asli Daerah	11.316.908.285,00	13.206.958.035,00
3	Dana Perimbangan	215.629.371.420,00	220.837.746.040,00
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.305.114.000,00	13.305.114.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>270.517.104.264,77</b>	<b>280.170.258.107,15</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA RUTIN</b>		
1	Belanja Administrasi Umum	192.795.787.225,00	168.374.480.809,00
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	44.486.453.013,00	40.004.778.219,00
3	Belanja Modal	21.624.025.978,00	18.495.718.478,00
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	14.903.737.553,00	14.263.857.553,00
5	Belanja Tidak Tersangka	1.500.000.459,77	906.110.248,15
	<b>JUMLAH BELANJA RUTIN</b>	<b>275.310.004.228,77</b>	<b>242.044.945.307,15</b>

Sumber: data diolah

- 2) Melakukan analisis varians dengan membandingkan selisih antara realisasi anggaran daerah dengan yang dianggarkan pada tahun anggaran 2004 dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase (%).

Berikut adalah hasil analisis varians pada ringkasan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat tahun anggaran 2004:

**Tabel 5.6**  
**Analisis Varians**  
**(Rupiah)**

URAIAN	JUMLAH		VARIANS (selisih)	%
	ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5
<b>PENDAPATAN</b>	<b>270.517.104.264,77</b>	<b>280.170.258.107,15</b>	<b>9.653.153.842,38</b>	<b>103.57</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	30.265.710.559,77	32.820.440.032,15	2.554.729.472,38	108,44
Pendapatan Asli Daerah	11.316.908.285,00	13.206.958.035,00	1.890.049.750,00	116,70
Dana Perimbangan	215.629.371.420,00	220.837.746.040,00	5.208.374.620,00	102,42
Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.305.114.000,00	13.305.114.000,00	0,00	100,00
<b>BELANJA RUTIN</b>	<b>275.310.004.228,77</b>	<b>242.044.945.307,15</b>	<b>-33.265.058.921,62</b>	<b>87.92</b>
Belanja Administrasi Umum	192.795.787.225,00	168.374.480.809,00	-24.421.306.416,00	87,33
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	44.486.453.013,00	40.004.778.219,00	-4.481.674.794,00	89,93
Belanja Modal	21.624.025.978,00	18.495.718.478,00	-3.128.307.500,00	85,53
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	14.903.737.553,00	14.263.857.553,00	-639.880.000,00	95,71
Belanja Tidak Tersangka	1.500.000.459,77	906.110.248,15	-593.890.211,62	60,41

Sumber: data diolah

### 3) Menarik Kesimpulan

Hasil analisis varians dapat diketahui pada bagian pendapatan bahwa realisasi lebih tinggi dari pada anggaran yang telah ditetapkan. Pada bagian belanja, realisasi anggaran belanja lebih rendah dari rencana anggaran yang berarti belanja untuk tahun anggaran 2004 bersifat menguntungkan.

**Tabel 5.7**  
**Kesimpulan Analisis Varians**

URAIAN	%	KESIMPULAN
<b>PENDAPATAN</b>		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	108.44	Meningkat
Pendapatan Asli Daerah	116.70	Meningkat
Dana Perimbangan	102.42	Meningkat
Lain-lain Pendapatan yang Sah	100.00	Sama
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>103.57</b>	Meningkat
<b>BELANJA RUTIN</b>		
Belanja Administrasi Umum	87.33	Menguntungkan
Belanja Operasi dan Pemeliharaan	89.93	Menguntungkan
Belanja Modal	85.53	Menguntungkan
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	95.71	Menguntungkan
Belanja Tidak Tersangka	60.41	Menguntungkan
<b>JUMLAH BELANJA RUTIN</b>	<b>87.92</b>	Menguntungkan

Sumber: data diolah

2. Tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2004 untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/ proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input.

Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data mengenai Ringkasan Perhitungan APBD Tahun 2004 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	Realisasi
Jumlah Pendapatan menurut Pemerintah Daerah (memasukkan Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu)	280.170.258.107,15
Jumlah Pendapatan sesuai UU Otonomi Daerah Tahun 2004 (tanpa Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu)	247.349.818.075,00
Jumlah Belanja/Pengeluaran Rutin	242.044.945.307,15

Sumber: data diolah

- 2) Menghitung tingkat efisiensi dengan cara membandingkan antara realisasi pengeluaran rutin dengan realisasi pendapatan dikalikan seratus (100) dalam bentuk persentase.

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input.

1. Tingkat Efisiensi Pengeluaran Rutin menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Agam:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran Rutin}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 242.044.945.307,15}{\text{Rp } 280.170.258.107,15} \times 100\% \\ &= 86,39\% \end{aligned}$$

2. Tingkat Efisiensi Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Agam sesuai Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004:

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Pengeluaran Rutin}}{\text{Realisasi Pendapatan sesuai UU Otonomi Daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 242.044.945.307,15}{\text{Rp } 247.349.818.075,00} \times 100\% \\ &= 97,86\% \end{aligned}$$

- 3) Menarik kesimpulan.

Hasil analisis efisiensi dapat diketahui:

1. Tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Agam untuk Tahun Anggaran 2004 sebesar 86,39% yang berarti cukup efisien.
2. Tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah Kabupaten Agam sesuai Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004 untuk Tahun Anggaran 2004 sebesar 97,86% yang berarti kurang efisien.

#### **D. Pembahasan**

Setelah penulis mengadakan analisis data yang terdiri dari analisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan dan analisis efisiensi pengeluaran rutin daerah, maka perlu ada pembahasan lebih lanjut dari hasil analisis tersebut. Pembahasan pertama adalah mengenai hasil analisis varians dan pembahasan kedua mengenai hasil analisis efisiensi.

1. Pembahasan hasil penerapan APBD berbasis kinerja di Kabupaten Agam.

- 1) Pendapatan

Pada bagian pendapatan, jumlah pos pendapatan varians sebesar Rp 9.653.153.842,38 yang berarti realisasi pendapatan naik mencapai 3,57% (103,57% - 100%) dari anggaran yang telah ditetapkan.

- (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang Lalu

Pada pos pendapatan, bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu varians sebesar Rp 2.554.729.472,38 artinya realisasi untuk pos pendapatan bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu naik dari anggaran yang telah ditetapkan.

(b) Pendapatan Asli Daerah

Bagian pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba badan usaha daerah dan lain-lain pendapatan varians sebesar Rp 1.890.049.750,00 artinya realisasi pada pos pendapatan untuk bagian pendapatan asli daerah naik dari anggaran yang telah ditetapkan.

(c) Dana Perimbangan

Bagian dana perimbangan yang terdiri atas pos bagi hasil pajak, pos bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana perimbangan dari propinsi varians sebesar Rp 5.208.374.620,00 artinya realisasi pada pos pendapatan untuk bagian dana perimbangan naik dari anggaran yang telah ditetapkan.

(d) Lain-lain Penerimaan yang Sah

Bagian lain-lain penerimaan yang sah terdiri atas bantuan dana penyeimbang dari Pemerintah dan lain-lain pendapatan yang sah varians sebesar 0 (nol) diperoleh kesimpulan bahwa antara rencana anggaran dan realisasi pada pos pendapatan untuk bagian lain-lain penerimaan yang sah adalah sama.

2) Belanja

Pada bagian jumlah pos belanja varians sebesar Rp 33.265.058.921,62 dimana realisasi belanja turun dari anggaran yang telah ditetapkan dan berarti menguntungkan yang mencapai 12,08% (100% - 87,92%).

(a) Bagian Administrasi Umum

Pada pos belanja, belanja bagian administrasi umum terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas varians sebesar Rp 24.421.306.416,00 artinya realisasi pada pos belanja untuk bagian belanja administrasi umum turun dan diartikan menguntungkan.

(b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Pada belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum milik daerah, yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja dinas varians sebesar Rp 4.481.674.794,00 artinya realisasi pada pos belanja untuk bagian belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum milik daerah turun dan diartikan menguntungkan.

(c) Belanja Modal

Pada belanja modal atau investasi varians sebesar Rp 3.128.307.500,00 artinya realisasi pada pos belanja untuk bagian belanja modal atau investasi turun dan diartikan menguntungkan.

(d) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Pada belanja bagi hasil dan bantuan keuangan atau tranfer varians sebesar Rp 639.880.000,00 artinya realisasi pada pos belanja untuk bagian belanja bagi hasil dan bantuan keuangan atau transfer turun dan diartikan menguntungkan.

(e) Belanja Tak Tersangka

Pada belanja tak tersangka varians sebesar Rp 593.890.211,62 artinya realisasi pada pos belanja untuk bagian belanja tak tersangka turun dan diartikan menguntungkan.

2. Pembahasan tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah Kabupaten Agam.

Dengan menggunakan rumus tersebut diatas, maka dapat diketahui tingkat efisiensi Pengeluaran Rutin daerah Kabupaten Agam menurut Pemerintah Daerah dengan memasukkan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebagai Pendapatan dimana selama periode penelitian Tahun Anggaran 2004 dengan tingkat efisiensi sebesar 86,39%, yang berarti cukup efisien dan dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Agam adalah cukup efisien. Tetapi tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah dimana tidak memasukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebagai Pendapatan yang sesuai Undang-undang Otonomi daerah Tahun 2004 adalah 97,86% yang berarti kurang efisien dan dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Agam adalah kurang efisien sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp 270.517.104.264,77 lebih kecil daripada realisasinya sebesar Rp 280.170.258.107,15 sehingga dalam realisasinya terjadi varians (selisih lebih) sebesar Rp 9.653.153.842,38 atau lebih tinggi sebesar 3,57% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada pos belanja, jumlah anggaran belanja Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 275.310.004.228,77 lebih besar daripada realisasinya sebesar Rp 242.044.945.307,15 sehingga dalam realisasinya terjadi varians sebesar Rp 33.265.058.921,62 atau lebih rendah sebesar 12,08% dari anggaran yang telah ditetapkan.
2. Tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah Kabupaten Agam menurut Pemerintah Daerah dimana selama periode penelitian Tahun Anggaran 2004 dengan tingkat efisiensi sebesar 86,39%, yang berarti cukup efisien dan dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Agam adalah cukup efisien. Berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004, tingkat efisiensi pengeluaran rutin daerah Tahun 2004

adalah 97,86% yang berarti kurang efisien karena sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu tidak dimasukkan sebagai Pendapatan, dan dapat dikatakan bahwa tingkat pencapaian kinerja keuangan daerah Kabupaten Agam adalah kurang efisien sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 .

### **B. Keterbatasan Penelitian**

Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Penulis hanya meneliti satu tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2004.
2. Dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam penulis hanya menggunakan teknik analisis varians dan analisis efisiensi.
3. Keterbatasan ruang lingkup penelitian dimana hanya berlaku pada Pemerintah Daerah yang diteliti yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.
4. Data yang diteliti adalah data yang dipublikasikan karena beberapa data menjadi rahasia Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

### **C. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang disampaikan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai pertimbangan dalam pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan daerah di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan efisiensi pengeluaran rutin daerah agar tercapai tingkat pengeluaran yang efisien.
2. Pemerintah Daerah sebaiknya tidak memasukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu sebagai Pendapatan, karena sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti lebih dari satu tahun anggaran agar kesimpulan yang diambil lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra dan Soepriyanto. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadillah, dan Muhtar. (2004). Proses Penyusunan Anggaran dan Pengalokasian Belanja Di Pemda Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 19, No. 1, 27-56.
- Golu, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hakim, Lukman. (2003). Anggaran Berbasis Kinerja Sebuah Reformasi Keuangan Daerah. *Jurnal Forum Inovasi*. Desember – Februari 2003, 10-13. Jakarta.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah, Seri Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- , (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Edisi revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- IAI-Kompartement Akuntan Sektor Publik-Bidang Akuntabilitas Sektor Publik. (2002). *Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. Makalah seminar 6 juli 2003.
- Mamesah, D.J. (1995). *System Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pusat Utama.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi offset: Yogyakarta.
- , (2003). *Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Makalah Seminar Nasional MEP. UGM. Yogyakarta.
- Nadeak, Ruslina. (2003). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan).
- Nugroho, Damasus. (2003). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan).
- PAU SE UGM. (2003). *Penyusunan Anggaran (RAPBD) Berdasarkan Pendekatan Kinerja*. Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan).

Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Penerbit Citra Umbara: Bandung.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Penerbit Citra Umbara: Bandung .

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Veteran No 1 Telp. (0752) 66064 Fax 66064 Lubuk Basung  
www.kabupaten-agam.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor . B. 070/47/KL/IV- 2005

TENTANG

**IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN/OBSERVASI**

Setelah mempelajari surat dari Ketua Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Nomor : 917/J16.6./PP-2005, Perihal Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian/observasi di Kabupaten Agam, yang dilakukan oleh :

Nama : **SRI MEDIA INSANI**  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 30 Mei 1983  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Simpang Gudang Manggopoh Lubuk Basung  
Nomor Kartu Identitas : NIM. 01 2114 238  
Judul Penelitian : **"ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD )  
BERBASIS KINERJA"**  
Lokasi Penelitian : Kantor Bupati Agam  
Waktu Penelitian : 25 April s/d 30 Juni 2005  
Anggota Penelitian : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

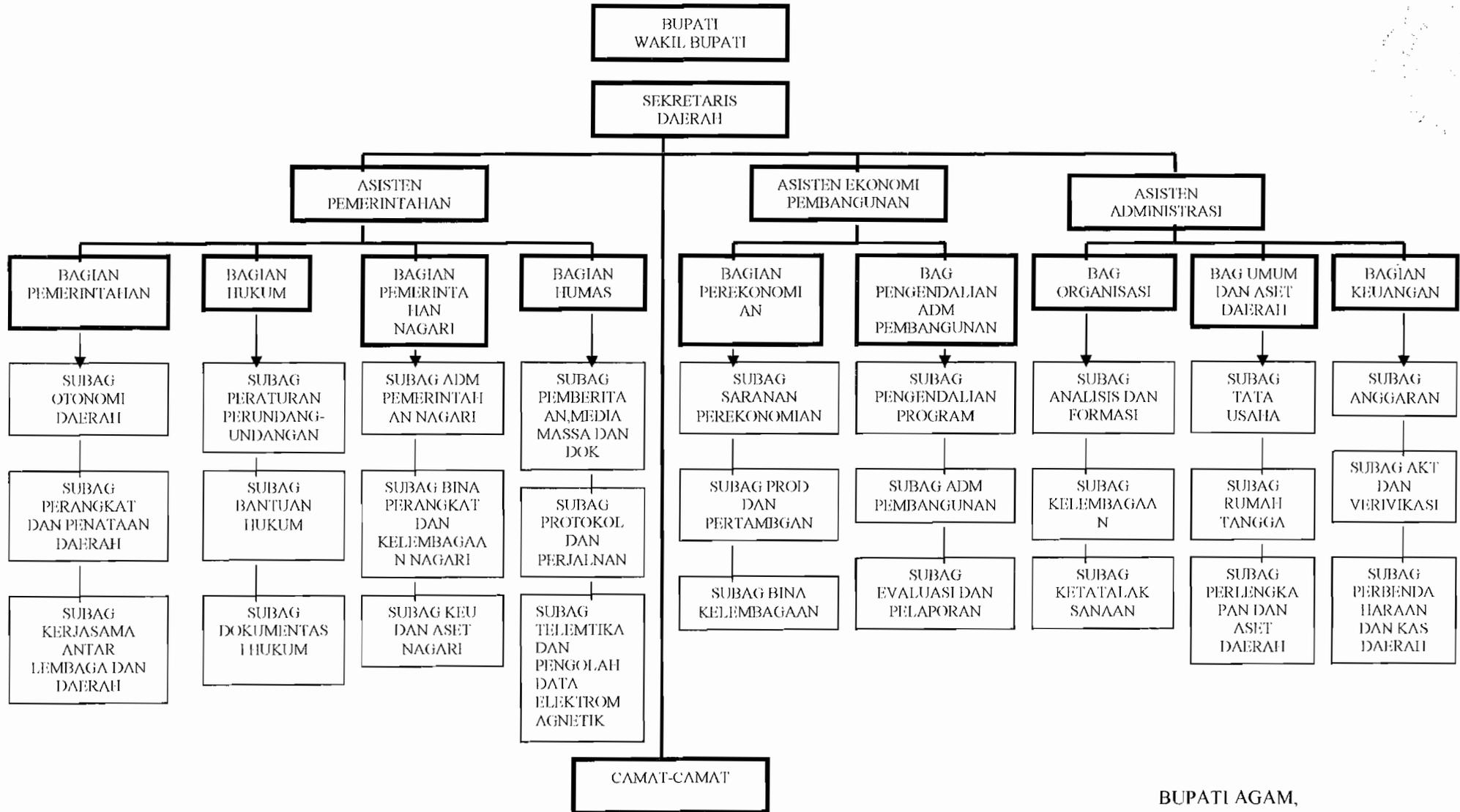
1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian/Survey/Observasi
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah/Wilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam Cq. Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Agam dan Camat/Instansi yang bersangkutan.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikianlah surat keterangan Rekomendasi Izin Penelitian/Survey/Observasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Lubuk Basung, 25 April 2005

An. **KAKAM KESBANG DAN LINMAS**  
**KASI KESBANG DAN HAM**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM**



**KETERANGAN**

- GARIS KOMANDO  
 —————> GARIS KOORDINASI

BUPATI AGAM,

dto

ARISTO MUNANDAR